



PENGARUH BELANJA TIDAK LANGSUNG TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KABUPATEN MAMUJU

Abdul Rajab

Universitas Muhammadiyah Mamuju

Email: rajab.daeng@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan Jenis data kuantitatif dan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimanakah pengaruh belanja tidak langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten Mamuju. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa Belanja Tidak Langsung (X) berpengaruh positif terhadap Produk domestik regional Bruto (Y) sedangkan mencari nilai signifikan melalui uji t maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti bahwa "Ada pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y)".

Kata kunci: Belanja Tidak Langsung, Produk Domestik Regional Bruto

Abstract

This research employs both quantitative and qualitative data. The objective of this study is to determine how indirect expenditure affects the Gross Regional Domestic Product (GRDP) in Mamuju Regency. The results of the research indicate that Indirect Expenditure (X) has a positive effect on the Gross Regional Domestic Product (Y). Furthermore, by seeking the significance value through the t-test, it can be concluded that the hypothesis is accepted, which means that "There is an effect of Indirect Expenditure (X) on the Gross Regional Domestic Product (Y)."

Keywords: Indirect Expenditure, Gross Regional Domestic Product (GRDP)

I. PENDAHULUAN

Setiap pemerintah yang ada baik pemerintahan pusat maupun daerah selalu melakukan berbagai jenis belanja sebagai wujud dari keberadaan pemerintahan yang berfungsi untuk menjalankan roda pemerintahan. Pembelanjaan yang dilaksanakan dalam bentuk pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan tentunya untuk membiayai administrasi pemerintah, pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan pembiayaan untuk keamanan Negara. Untuk itu, pemerintah punya kewajiban mutlak dalam pemanfaatan dan pengoptimalan untuk mengumpulkan dan menampung sumber-sumber dana untuk membiayai seluruh pengeluaran yang akan dilakukan oleh daerah yang tentu saja pengeluaran ini tujuannya adalah untuk pembangunan ekonomi yang ada di daerah.

Untuk peningkatan kesejahteraan rakyat salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui pembangunan peningkatan ekonomi baik dalam tingkat pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat. Adapun menurut Todaro dan Smith (2011:15) dimana mereka mengemukakan bahwa "Pembangunan yang akan dilaksanakan pada suatu Negara pada

hakikatnya Akan dijelaskan dengan tiga hal pokok yaitu: dengan memperhatikan tingkat ketersediaan penyaluran kebutuhan pokok untuk rakyat dalam suatu Negara, serta memperhatikan dari segi kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan daya kemampuan rakyat disuatu negara dalam memperoleh kegiatan ekonomi yang akan mempermudah dalam memenuhi kebutuhannya serta terciptanya aktivitas sosial dalam kehidupan yang kondusif”.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Mankiw (2012, 76) dimana kemukakan bahwa “Pertumbuhan ekonomi selalu memperlihatkan sejauh mana kegiatan perekonomian pasti akan mengalami penambahan pendapatan disetiap periode waktu yang akan datang, adapun indikator yang akan dipakai dalam mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu Negara ialah besarnya pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) selain itu untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara menggunakan Produk Domestik Regional Bruto “. Sedangkan menurut Sukirno (2012:61) Dalam sebuah Negara Produk domestik bruto (PDB) yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan disebuah Negara dengan tahun tertentu dengan faktor produksi yang dihasilkan oleh rakyat di Negeranya serta masyarakat di Negara-negara lain. Dari teori diatas dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor produksi itu sangat besar pengaruhnya dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto semakin tinggi permintaan barang dan jasa maka semakin tinggi juga faktor-faktor produksi.

Secara geografis daerah Kabupaten Mamuju yang menjadi bagian dari provinsi Sulawesi Barat merupakan daerah yang strategis dimana didalamnya terdapat beberapa sarana penunjang perekonomian diantaranya keberadaan kantor pemerintahan Provinsi, terdapatnya sarana transportasi darat, laut dan udara yang memudahkan dalam kegiatan perekonomian baik mengirim barang maupun yang menerima barang kebutuhan masyarakat, sehingga dengan adanya fasilitas penunjang dalam perekonomian ini maka tentu diharapkan dapat memberikan dampak yang baik utamanya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah dimana segala pembiayaan daerah penggunaannya diatur oleh daerah itu sendiri salah satu pengeluaran daerah yaitu melalui belanja yang tidak langsung yang terdiri dari belanja untuk pegawai, belanja untuk bunga, belanja untuk subsidi, belanja untuk hibah dan belanja untuk bantuan sosial.

Dengan adanya belanja tidak langsung ini, tentu saja dari sisi pendapatan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang tentunya akan mendorong meningkatnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu. Dengan kondisi ini produsen barang dan jasa harus merespon dengan cepat dengan penyediaan ataupun menambah produksi barang dan jasa sebagai akibat dari tingginya permintaan masyarakat.

Anggaran belanja tidak langsung yang ditetapkan oleh pemerintah bukan hanya sebagai bagian dari belanja daerah semata namun juga bisa berfungsi sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kegiatan perekonomian yang ada di daerahnya apalagi bagi kabupaten Mamuju yang masih perlu melakukan pembangunan maupun pengembangan infrastruktur yang ada saat ini. Semakin tingginya tingkat aktivitas ekonomi masyarakat maupun produsen dalam memproduksi barang dan jasa tentu akan berdampak kepada hal-hal lainnya diantaranya semakin banyaknya penyerapan tenaga kerja, semakin banyaknya peluang usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan tentu juga semakin banyak sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat diperoleh. Disamping itu diharapkan juga rangsangan belanja tidak langsung ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada sehingga peran dan upaya pemerintah daerah untuk menjadi daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi dapat terwujud, tentu saja hal ini tidaklah mudah karena dibutuhkan kerjasama antara masyarakat,

pihak produsen serta pemerintah sendiri dalam memanfaatkan belanja tidak langsung yang dianggarkan.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju <https://mamujukab.bps.go.id/dynamictable/2017/07/05/114/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdrb-kabupaten-mamuju-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-persen-2011-2019.html> (diakses tanggal 05 Mei 2020), maka dapat kita lihat tingkat produk domestik regional bruto kabupaten mamuju dalam kurung waktu 2015-2019.

Tabel 1.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2015-2019

Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten tahun 2015-2019				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.75	4.99	8.12	6.02	2.67
B. Pertambangan dan Penggalian	8.22	9.9	8.25	8.87	7.12
C. Industri Pengolahan	7.21	2.79	8.57	6.85	5.85
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.12	23.97	8.5	7.98	5.89
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7.77	12.19	9.65	8.49	11.65
F. Konstruksi	9.29	9.64	5.85	5.09	8.1
G. Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.24	3.77	5.63	6.26	6.17
H. Transportasi dan Pergudangan	7.19	15.15	9.32	4.86	0.58
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.42	8.5	0.89	10.01	12.49
J. Informasi dan Komunikasi	10.22	10.04	9.98	8.46	7.18
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.78	6.95	10.73	5.8	-2.51
L. Real Estate	6.61	5.06	5.58	7.04	9
M,N. Jasa Perusahaan	6.22	3.24	5.41	3.72	9
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	12.12	13.73	3.69	4.82	7.98
P. Jasa Pendidikan	6.1	10.59	6.01	4.09	9
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.2	13.9	6.29	7.3	5
R,S,T,U. Jasa Lainnya	8.18	8.01	9.16	5.83	11.1
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7.6	7.81	7.11	6.03	5.54

Sumber: *BPS Kabupaten Mamuju 2020*

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas maka dapat dijelaskan bahwa laju pertumbuhan dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi atau naik turun, hal ini dapat dilihat dimana pada tahun

2015 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,6%, dan pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 7,81%. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi mengalami menurun menjadi 7,11%, pada tahun 2018 juga mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 6,03% dan begitu pula di tahun 2019 mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 5,54

% dan tahun 2019 ini merupakan laju pertumbuhan ekonomi terendah selama 5 tahun terakhir.

Sektor yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB tahun 2015 adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai sebesar 12.12% dan kontribusi yang paling rendah adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai sebesar 3.24%, Sektor yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB tahun 2016 adalah Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai sebesar 23.97% dan kontribusi yang paling rendah adalah Industri Pengolahan dengan nilai sebesar 2.79%. Sektor yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB tahun 2017 adalah Jasa Keuangan dan Asuransi dengan nilai sebesar 10.73% dan kontribusi yang paling rendah adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai sebesar 0.89%, sektor yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB 2018 adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai sebesar 10.01% , dan kontribusi yang paling rendah adalah jasa perusahaan dengan nilai sebesar 3.72%, pada tahun terakhir sektor yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB tahun 2019 adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai sebesar 12.49% dan kontribusi yang paling rendah adalah jasa keuangan dan asuransi dengan nilai sebesar -2.51%. Jadi disini dapat dilihat kontribusi yang besar dan terendah dalam sektor PDRB 5 tahun terakhir sebagaimana yang disajikan pada tabel diatas.

Sebagai daerah yang masih relatif baru, kabupaten Mamuju cukup potensial untuk mengembangkan sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal. Dengan adanya belanja tidak langsung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maka sangat diharapkan dapat memberikan perubahan utamanya peningkatan pengeluaran masyarakat yang tentu saja dapat pula mempengaruhi peningkatan produksi barang dan jasa yang berdampak kepada peningkatan pertumbuhan produk domestik regional bruto kabupaten Mamuju sehingga dapat menjadi daerah yang cukup berkembang dalam pertumbuhan ekonomi.

II. KAJIAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznet dalam Jhigan (2010:57) dalam “kuliahnya pada waktu perayaan nobel memberikan penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan suatu Negara yang memiliki tingkat kenaikan jangka panjang dengan mengadakan lebih banyak aneka ragam produk. Produk ekonomi kepada rakyatnya potensi kemajuan teknologi yang ada di Negara tersebut akan berkembang. Selain itu kesesuaian kelembagaan dan ideologis juga dibutuhkan. “ Penjelasan itu juga mempunyai 3 (tiga) komponen dimana yang pertama menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi disebuah Negara itu tampak melalui peningkatan stok barang yang tidak ada henti-hentinya, yang kedua menyatakan bahwa kemajuan teknologi perwujudan dalam sebuah pertumbuhan ekonomi baik yang paling menentukan ialah tingkat pertumbuhan ekonomi, keahlian dari berbagai macam barang kebutuhan kepada rakyat, dan yang ketiga menyatakan bahwa dengan memanfaatkan ilmu teknologi secara keseluruhan dan tepat membutuhkan berbagai penyesuaian dibidang kelembagaan serta ideology kemudian penemuan baru akan didapatkan melalui kemampuan manusia dalam memperoleh ilmu

pengetahuan yang dapat dimanfaatkan serta adanya dukungan dari pemerintah di suatu Negara sehingga Negara dapat maju.

Salvatore (2017:194) menjelaskan bahwa Seiring dengan jalannya waktu, masyarakat akan terus tumbuh biasanya disuatu Negara. Selain itu dengan adanya angkatan kerja yang terus berkembang , baik dengan adanya pemanfaatan berbagai sumber daya yang dapat menghasilkan alat-alat dalam pemanfaatan modal, Negara harus menambah ketersediaan modal” dengan adanya modal ini bertujuan untuk agar rakyat dapat membuat peralatan sendiri untuk dipakai dalam kegiatan proses produksi, contohnya seperti produksi mesin, pabrik produksi, serta adanya sarana transportasi, perkantoran, alat komunikasi yang dapat mempermudah kita dalam mengetahui informasi. Serta dengan adanya pendidikan dan pelatihan untuk sumbet daya manusia itu semua dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan didalam Negara untuk berkembang proses profuksi barang dan jasa.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan peningkatan output perkapita dalam waktu jangka panjang, selain itu juga memiliki proses penekanannya seperti output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi ialah suatu proses dan bukan suatu gambaran ekonomi pada sebuah Negara. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan bersifat dinamis disuatu Negara yang perekonomian dan perkembangan akan berubah dari waktu ke waktu.

Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan negara dan rencana pembangunan yang akan dilakukan. Pertumbuhan ekonomi yang kurang baik dapat dijadikan landasan untuk menerima bantuan dana dari pihak internasional, seperti Bank Dunia atau negara lain. Sedangkan bagi para pelaku sektor usaha atau perusahaan, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan dasar dalam membuat rencana pengembangan produk dan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Bagaimana menghitung pertumbuhan ekonomi suatu Negara/Daerah? Yaitu dengan menggunakan seluruh indikator PDB, pertumbuhan ekonomi dapat dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut.

$$R(t-1, t) = \frac{(PDBt - PDBt-1)}{PDBt-1} \times 100\%$$

Keterangan:

R = tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase (%)

PDBt = produk domestik bruto pada tahun t

PDBt-1 = produk domestik bruto pada tahun sebelumnya

Faktor yang Dapat Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa faktor penting yang dipandang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut Lincoln (2010: 115), diantaranya adalah:

a. Faktor sumber daya manusia (SDM).

Sumber daya manusia adalah suatu faktor yang penting karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena SDM merupakan faktor yang penting dalam proses pembangunan, cepat atau lambatnya proses dari pembangunan sangat tergantung pada sumber daya manusianya yang selaku sebagai subjek pembangunan yang mempunyai kompetensi yang baik dan cukup memadai untuk melaksanakan proses dari pembangunan tersebut.

b. Faktor sumber daya alam (SDA)

SDA atau sumber daya alam merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, karena umumnya negara yang sedang dalam tahap perkembangan sangat bergantung pada sumber daya alam dalam pembangunan negaranya. Akan tetapi jika bergantung pada sumber daya alam saja tidak akan menjamin kesuksesan dalam proses pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, jika tidak di dukung dengan kemampuan SDM (Sumber daya manusia) dalam mengelola SDA (sumber daya alam) yang ada.

c. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Perkembangan ilmu pengetahuan semakin kesini semakin pesat khususnya di bidang teknologi, hal tersebut dapat mempengaruhi pembangunan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara, misalnya penggantian dalam memproduksi barang yang asalnya menggunakan tenaga manusia sekarang sudah banyak yang menggunakan mesin yang canggih dan modern yang tentunya akan lebih efisien dan lebih cepat dalam menghasilkan produk, yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

d. Faktor budaya.

Faktor yang penting lainnya yaitu faktor budaya, faktor ini akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki fungsi sebagai pendorong proses pembangunan misalnya seperti kerja keras, bersikap jujur, sopan, dan lain-lain. Akan tetapi faktor ini biasa juga menghambat proses pembangunan atau pertumbuhan ekonomi misalnya seperti sikap egois dan anarkis

e. Sumber daya modal

Faktor sumber daya modal sangatlah dibutuhkan manusia dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan meningkatkan kualitas dari Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK). Sumber daya modal ini misalnya berupa barang yang penting untuk perkembangan serta kelancaran dalam pembangunan ekonomi, sebab barang modal ini juga bisa meningkatkan dan memperbaiki produksi.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pengaturan keuangan negara melalui anggaran pemasukan maupun pengeluaran negara yang biasa dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan ini sangatlah penting dan vital sebab besar maupun kecilnya belanja maupun pengeluaran negara itu tergantung dari bagaimana kebijakan fiskal itu sendiri.

Setiap pemerintahan yang ada tentu menginginkan adanya anggaran yang besar yang bisa dikelola oleh pemerintah setempat, sebab semakin besar anggaran yang dikelola maka semakin besar pula pembiayaan dalam pembangunan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah begitu juga sebaliknya jika anggaran belanja yang dikelola oleh pemerintah kecil maka semakin sedikit pula pembiayaan pembangunan yang bisa dilaksanakan. Setiap negara anggaran pembangunannya sangat tergantung dari kebijakan fiskal yang diterapkan dalam negara masing-masing, semakin kuat dan besarnya pengaruh kebijakan fiskal yang ada maka akan semakin mempengaruhi jumlah pendapatan negara yang bisa dikelola, namun kadang bagi negara yang sedang berkembang sangat sulit untuk mencapai maksimal pendapatan negara melalui kebijakan fiskal tersebut, sebab kadang kala kesadaran masyarakat yang kadang kurang mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam pelaksanaan pengeluaran pemerintah itu dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu belanja barang maupun jasa serta belanja transfer kepada seluruh wilayah yang ada. Dalam

tujuan belanja ini tentu ada hal-hal mendasar yang ingin dicapai oleh pemerintah disamping memang merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk membantu keuangan setiap daerah guna menunjang dalam pembangunan sektor ekonomi yang ada di daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/ kota yang ada, sehingga pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat akan juga berdampak secara nasional dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional sepanjang pertumbuhan daerah setiap daerah juga mengalami peningkatan melalui pengelolaan maupun penggunaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Untuk pengertian kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menjadi pengendali dalam perekonomian yang ada melalui pendapatan yang ada maupun pengeluaran dalam bentuk belanja dengan penetapan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah melalui masyarakat wajib pajak. Perlu dipahami bahwa dalam pengendalian perekonomian ada dua kebijakan yang sering dilakukan oleh pemerintah yaitu kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri itu tidaklah sama dengan kebijakan fiskal sebab kalau kebijakan fiskal bersifat bagaimana pemerintah dapat memperoleh pendapatan melalui pengenaan wajib pajak sedangkan kebijakan moneter lebih menekankan pada pengendalian ekonomi guna menstabilkan perekonomian melalui pengaturan peredaran jumlah uang yang beredar serta tingkat suku bunga yang ada didalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Alasan mendasar pemerintah dalam kebijakan fiskal tentu untuk mempengaruhi perekonomian yang ada sebagaimana apa yang diinginkan oleh pemerintah, dengan berjalannya perekonomian sesuai keinginan pemerintah tentu hal-hal yang menjadi target pemerintah diharapkan dapat tercapai. Dengan adanya pengaruh kebijakan fiskal terhadap pendapatan negara secara nasional tentu akan berdampak luas lagi kepada berbagai sektor lainnya, sebab semakin tinggi pendapatan pemerintah maka semakin banyak dana yang bisa dianggarkan untuk belanja negara yang diharapkan peningkatan belanja tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang dengan semakin tingginya masyarakat yang bekerja maka akan meningkatkan kesejahteraan yang akan mendorong peningkatan belanja. Semakin meningkat belanja masyarakat maka produksi barang akan semakin ditingkatkan sehingga akan mendorong terjadinya peningkatan investasi.

Belanja Tidak Langsung

Mengingat Pedoman peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Moneter Teritorial dimana Rencana Penggunaan Konsumsi Berbentuk tidak langsung diidentikkan dengan pelaksanaan proyek dan latihan yang dilakukan di daerah tersebut. Kemudian, kelompok Konsumsi Berkelanjutan terdiri dari: Penggunaan tenaga kerja, bunga, sponsor, penghargaan, bantuan sosial, pembagian penggunaan, bantuan moneter, dan penggunaan tiba-tiba.

a. Belanja Pegawai

Penggunaan pegawai atau belanja pegawai adalah konsumsi untuk membayar, sebagai kompensasi dan pengiriman uang, seperti gaji lain yang diberikan kepada pegawai pemerintah yang diselesaikan sesuai pengaturan hukum.

Selanjutnya penganggaran Belanja Pegawai memperhatikan hal-hal berikut :

1. Pemerintah lingkungan dapat memberikan pendapatan tambahan kepada pegawai pemerintah yang bergantung pada pencapaian target dengan mempertimbangkan batas moneter lokal dan memperoleh dukungan DPRD sesuai dengan pengaturan undang-

undang dan pedoman.

2. Gaji tambahan sebagaimana disinggung di atas diberikan sehubungan dengan peningkatan bantuan perwakilan pemerintah yang bergantung pada tanggung jawab atau lingkungan kerja atau kondisi kerja atau kekurangan pemanggilan atau pelaksanaan pekerjaan.
3. Gaji tambahan tergantung pada tanggung jawab diberikan kepada pegawai pemerintah yang bermasalah dengan pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dianggap melampaui pekerjaan biasa.
4. Gaji tambahan tergantung tempat administrasi diberikan kepada aparatur pemerintah yang dalam menyelesaikan kewajibannya berada di daerah dengan derajat kesulitan yang tidak dapat disangkal dan jauh di wilayah yang jauh.
5. Gaji tambahan yang bergantung pada kondisi kerja diberikan kepada pegawai pemerintah yang dalam menjalankan kewajibannya berada di tempat kerja yang berisiko tinggi.
6. Gaji tambahan tergantung kurangnya panggilan diberikan kepada pegawai pemerintah yang dalam menyelesaikan kewajibannya memiliki kemampuan luar biasa dan tidak biasa.
7. Gaji tambahan tergantung kinerja pekerjaan diberikan kepada pegawai pemerintah yang dalam melaksanakan kewajibannya dianggap melaksanakan pekerjaan.
8. Standar untuk menghasilkan pendapatan tambahan ditentukan oleh pedoman kepala daerah.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk pembayaran angsuran bunga obligasi yang ditentukan berdasarkan pengecualian penting yang bergantung pada pengaturan kredit saat ini, jangka menengah dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

1. Pengeluaran alokasi digunakan untuk membelanjakan bantuan biaya pembuatan untuk organisasi / perusahaan tertentu sehingga biaya penjualan barang / administrasi yang dikirimkan dapat dikurangi oleh keseluruhan populasi.
2. Organisasi / yayasan tertentu adalah organisasi / instansi yang memproduksi barang atau administrasi publik.
3. Organisasi / yayasan yang menerima konsumsi bersponsor pada awalnya harus dievaluasi sesuai dengan pengaturan administrasi moneter negara dan peninjauan tanggung jawab.
4. Terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima peruntukan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan aset yang dibiayai kepada kepala provinsi.
5. Belanja peruntukan direncanakan berdasarkan kebutuhan organisasi / lembaga yang menerima sponsorship dalam pedoman daerah tentang APBD, yang pelaksanaannya juga diatur dalam pedoman kepala daerah.

d. Belanja Hibah

1. Pengeluaran penghargaan digunakan untuk rencana keuangan untuk pengaturan penghargaan sebagai uang tunai, barang dagangan dan / atau administrasi kepada otoritas publik atau pemerintah lingkungan lainnya, dan pertemuan / orang-orang lokal yang porsinya telah ditentukan secara eksplisit.
2. Penyusunan penghargaan berupa uang tunai dapat direncanakan jika pemerintah daerah telah memenuhi semua kebutuhan untuk usaha wajib guna memenuhi pedoman dasar pendampingan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Penghargaan dalam bentuk barang dapat diberikan jika barang dagangan tidak memiliki insentif uang bagi pemerintah lingkungan yang bersangkutan namun bermanfaat bagi otoritas publik atau pemerintah terdekat lainnya dan / atau pertemuan / orang lokal.
4. Penyusunan penghargaan sebagai penyelenggara dapat direncanakan apabila pemerintah teritorial telah memenuhi semua prasyarat konsumsi usaha wajib untuk memenuhi pedoman bantuan dasar yang ditetapkan dalam pedoman hukum.
5. Penghargaan sebagai uang tunai atau sebagai produk atau administrasi dapat diberikan kepada pemerintah teritorial tertentu selama ditentukan dalam pedoman hukum.

e. Bantuan Sosial

1. Bantuan sosial digunakan untuk rencana pengeluaran untuk pengaturan bantuan dengan jenis uang tunai dan / atau produk ke daerah setempat untuk meningkatkan bantuan pemerintah daerah setempat.
2. Bantuan sosial diberikan tidak terus menerus / tidak berulang setiap tahun anggaran, bersifat khusus dan jelas dalam pemanfaatannya.
3. Untuk memenuhi kapasitas APBD sebagai instrumen pemerataan dan nilai dengan tujuan akhir untuk meningkatkan administrasi publik dan bantuan pemerintah, bantuan jenis uang tunai dapat direncanakan jika pemerintah teritorial telah memenuhi semua kebutuhan wajib. melakukan konsumsi untuk memenuhi pedoman bantuan dasar yang ditentukan dalam pedoman hukum.
4. Bantuan untuk kelompok ideologis diberikan dalam kesepakatan pengaturan hukum dan pedoman dan direncanakan untuk bantuan sosial.

f. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil merupakan Pemanfaatan pembagian manfaat digunakan untuk pengeluaran lanjutan dari pendapatan umum ke kabupaten/ masyarakat perkotaan atau pendapatan daerah / kota ke pemerintah kota atau pendapatan pemerintah provinsi tertentu ke pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan hukum.

g. Bantuan keuangan

1. Bantuan moneter atau keuangan digunakan untuk rencana pengeluaran untuk bantuan moneter umum atau eksplisit dari daerah ke daerah / masyarakat perkotaan, pemerintah kota, dan ke pemerintah terdekat lainnya atau dari pemerintah daerah / daerah ke pemerintah kota dan pemerintah lingkungan lainnya sehubungan dengan penyebaran merata dan / atau membatasi bangunan uang.
2. Bantuan keuangan dalam bentuk keseluruhan, penugasan dan pemanfaatannya, sepenuhnya diberikan kepada pemerintah provinsi / kota yang mendapat bantuan tersebut.
3. Bantuan keuangan yang secara eksplisit ditugaskan dan diawasi oleh pemerintah daerah yang memberikan bantuan.
4. Pemasok bantuan tidak biasa mungkin memerlukan pengaturan koordinasi dengan aset dalam APBD atau pendapatan kota dan menggunakan rencana pengeluaran untuk penerima bantuan.

h. Belanja Tidak Terduga

1. Konsumsi tiba-tiba atau tidak langsung digunakan untuk latihan yang tidak biasa atau tidak diharapkan mengulangi hal yang sama, misalnya, administrasi peristiwa bencana dan bencana sosial yang tidak diantisipasi, termasuk penggantian pendapatan yang berlimpah dari lokasi tutup tahun sebelumnya .
2. Latihan yang tidak lazim, khususnya untuk reaksi krisis dalam rangka mencegah pengaruh yang meresahkan terhadap kesehatan organisasi pemerintah dalam membuat

keamanan, kerukunan dan permintaan publik di daerah.

3. Kembalinya pendapatan provinsi yang melimpah dari tahun-tahun sebelumnya yang harus dijunjung tinggi dengan bukti yang sah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijelaskan diatas terkait dengan kolompok belanja tidak langsung, maka segala bentuk belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sangat diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat maka tentu saja akan semakin memberikan peluang kepada pihak produsen untuk meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut sjafrizal (2016:181) menjelaskan bahwa “ Pada dasarnya, PDRB Provinsi Neto adalah informasi dan data penting tentang pelaksanaan keuangan suatu kabupaten dalam periode tertentu “. Secara konklusif, PDRB pada dasarnya adalah jumlah perkiraan tenaga kerja dan produk yang dibuat dalam suatu ruang di masa tertentu. Ahkri sampai akhir-akhir ini, informasi PDRB sudah dapat diakses hampir di semua daerah, yang tersebar di seluruh wilayah / perkotaan di Indonesia, tentunya yang disalurkan setiap tahun melalui kantor focal terukur setiap kecamatan. Penataan yang diidentikkan dengan perekonomian daerah, seperti pembangunan perekonomian daerah, pembangunan keuangan provinsi dan proporsi bantuan pemerintah teritorial, yang untuk menghitungnya menggunakan informasi dari PDRB sebagai data fundamental.

Dalam Tarigan (2012:24) menjelaskan tentang metode perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi tiga pendekatan :

1. Pendekatan Produksi.

Pendekatan ini adalah estimasi estimasi tambahan tenaga kerja dan produk yang dikirim oleh pergerakan moneter / area dengan mengambil setengah biaya dari total estimasi penciptaan bersih area atau sub-area tersebut. Metodologi ini umumnya digunakan untuk menilai estimasi tambahan bidang / kegiatan yang pembuatannya sebagai merchandise aktual, seperti agribisnis, pertambangan, dan bisnis lainnya. Nilai tambahnya adalah kontras antara harga produksi dan harga harga tengah jalan, khususnya bahan mentah luar yang digunakan dalam interaksi pembuatan.

2. Pendekatan Pendapatan.

Dalam model ini, estimasi tambahan dari setiap tindakan keuangan dinilai dengan memasukkan semua kompensasi yang didapat oleh komponen ciptaan, yaitu gaji dan tingkat gaji tertentu dan ekse bisnis, devaluasi dan bea masuk bersih. Di bidang pemerintahan dan bisnis yang tidak menguntungkan, kelebihan bisnis tidak dipertimbangkan. Strategi pendekatan pembayaran umumnya digunakan di wilayah pendampingan namun tidak diikuti dengan biaya pasar yang serupa, misalnya di wilayah otoritas publik. Hal ini karena kurangnya informasi dan tidak adanya teknik yang tepat yang dapat digunakan untuk mengukur perkiraan pembuatan dan biaya tengah jalan dari berbagai latihan bantuan, terutama latihan biaya pernyataan itu. Selain itu, kutipan sering kali tidak mencerminkan biaya asli untuk administrasi yang mereka berikan, misalnya area sekolah dan klinik.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang di produksi di dalam negeri. Kalau dilihat dari segi penggunaan maka total

penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk:

- a. Konsumsi rumah tangga
- b. Konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung,
- c. Konsumsi pemerintah,
- d. Pembentukan modal tetap bruto,
- e. Perubahan stok, dan
- f. Ekspor neto.

Perlu diperhatikan bahwa pada golongan di atas, pemanfaatan manfaat mencari lembaga dikecualikan karena pemanfaatannya bukan pemanfaatan akhir, akibatnya merupakan pemanfaatan terakhir, maka jika digabungkan akan ada perkiraan ganda. Jadi poin yang ditentukan adalah pemanfaatan terakhir yang saat ini tidak akan dimakan oleh berbagai pihak yang menkomsumsi.

Tarif bersih adalah tarif lengkap, pendek, impor absolut. Persediaan mutlak di negara ini lengkap dibuat dan impor lebih sedikit tarif. Karena hanya estimasi tenaga kerja dan produk yang berasal dari kreasi dalam negeri yang ditentukan, penggunaan lengkapnya harus dikurangi dengan estimasi impor pada saat itu ditambah dengan estimasi tarif. Perubahan saham adalah perbedaan antara kondisi menjelang awal tahun dan akhir tahun untuk barang dagangan yang berada di pusat distribusi broker atau saham dalam interaksi penciptaan produksi barang maupun jasa.

Sebenarnya semua hal, pendekatan penggunaan juga memastikan apa yang dikirim di ruang tetapi hanya menjadi pengguna atau pengguna akhir. Berbeda dengan pendekatan penciptaan, pendekatan penggunaan tidak menyebabkan estimasi ganda karena apa yang telah dikonsumsi oleh individu atau organisasi sebagai pemanfaatan konklusif saat ini tidak dapat dikonsumsi oleh orang lain atau perusahaan. Dalam pendekatan kreasi, apa yang dikirim oleh pembuat mungkin penting bagi kreasi lain karena digunakan sebagai bahan mentah. Selanjutnya pemanfaatan material dari daerah yang berbeda harus dikurangi terlebih dahulu agar tidak terjadi penghitungan ganda.

III. METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, adapun yang menjadi metode pengumpulan datanya dilakukan lewat dokumentasi, interview dan analisa langsung yang diperoleh melalui kunjungan langsung dengan membawa surat iziin penelitian ke instansi yang berhubungan dengan penelitian ini yang akan diteliti dalam hal ini kantor badan pusat statistik kabupaten Mamuju.

Metode Analisis

Adapun metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan kuantitatif, dimana teknik ini menggunakan metode pemeriksaan kumbuh dasar. Penyelidikan informasi dilakukan dengan menguji informasi variabel secara terukur yang telah dikumpulkan dengan bantuan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 22. Hasil pemeriksaan diandalkan untuk digunakan untuk menentukan dampak dari beberapa faktor otonom pada variabel yang membutuhkan.

1. Persamaan Regresi Sederhana

Menurut Suliyanto (2011: 39) menyatakan bahwa “regresi sederhana digunakan untuk menganalisis hubungan keterkaitan satu variabel bebas terhadap variabel terikat”. Model persamaan regresi yang digunakan untuk melakukan analisis regresi linier sederhana yaitu sebagai berikut ini:

$$Y = a + bx$$

Keterangan :

Y = nilai yang diramalkan

a = konstanta/intercept

b = koefisien regresi/slope

X = Variabel bebas

2. Uji T (parsial)

Setelah nilai persamaan regresi sederhananya didapatkan maka dapat dicari lagi pengujian hipotesisnya dengan melakukan uji T. Dimana pengujian hipotesis ini dasar pengambilan keputusannya dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka dapat dikatakan ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).
2. Sebaliknya jika nilai dari t hitung lebih kecil dari t tabel maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

3. Koefisien Korelasi (R²)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dapat menggunakan hasil analisis koefisien korelasi yaitu melihat seberapa besar nilai R square yang didapatkan.

Untuk memudahkan dalam menganalisis data yang akan dianalisis baik data variabel bebas yaitu belanja tidak langsung dan variabel terikat yaitu produk domestik regional bruto, maka digunakan bantuan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 22 yang lebih memudahkan peneliti dalam mengolah data yang diperoleh.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data dan Pembahasan Hasil Penelitian

Sebelum melakukan uji analisis menggunakan bantuan program spss maka terlebih dahulu peneliti menampilkan data-data belanja tidak langsung dan data mengenai produk domestik regional bruto yang akan menjadi dasar pengolah data sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Rekap Data Belanja Tidak Langsung Dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mamuju Tahun 2010-2019

No	Tahun	Belanja Tidak langsung (x) (Ribu Rupiah)	PDRB (Y) (Juta Rupiah)
1	2010	424.560.347	4.164.029,98
2	2011	478.209.747	4.637.587,64
3	2012	359.542.873	5.097.710,14
4	2013	423.102.949	5.528.210,66
5	2014	373.208.117	6.012.402,70

PENGARUH BELANJA TIDAK LANGSUNG TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KABUPATEN MAMUJU

6	2015	471.066.251	6.469.545,89
7	2016	684.775.375	6.974.983,10
8	2017	796.605.238	7.470.709,96
9	2018	723.651.017	7.921.239,36
10	2019	746.655.914	8.360.314,79

Sumber data: BPS Kabupaten Mamuju

Untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data yang diperoleh maka dibuat rekapan data baik nilai data belanja tidak langsung dan produk domestik regional bruto sebagaimana yang ada pada tabel 7 di atas yang kemudian akan dijadikan sebagai data dasar untuk diolah lebih lanjut yang hasil dari olah data tersebut akan diinterpretasikan oleh peneliti.

Tabel. 2
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	241.03	922.104		2.614	.031
X	.007	.002	.839	4.355	.002

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah SPSS, 2020

Secara umum rumus persamaan regresi sederhana adalah $Y = a + bx$. Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel 2 di atas maka nilai koefisien regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a = angka konstan dari unstandardized coefficients. Dalam penelitian ini nilainya sebesar 241.03. angka ini merupakan nilai konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada Belanja Tidak Langsung (X) terhadap variabel dependen maka akan diperoleh nilai konstan Produk Domestik Regional Bruto (Y) adalah sebesar 241.03

b = angka koefisien regresi. Nilainya sebesar 0.007. angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan Rp. 1 tingkat nilai yang diberikan oleh Belanja Tidak Langsung (X), maka Produk Domestik Regional Bruto (Y). akan meningkat sebesar 0.007

karna nilai koefisien Belanja Tidak Langsung yang diperoleh pada penelitian ini bernilai positif (+), maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa Belanja tidak langsung (X) berpengaruh positif terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (Y). Sehingga persamaan regresinya dapat dituliskan sebagai berikut

$$Y = 241.03 + 0.007 X$$

Setelah diperoleh nilai koefisien regresinya serta penjelasan dan penulisan persamaan regresi linear sederhananya maka kita akan melihat uji hipotesisnya. Uji hipotesis atau uji

pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak (dalam arti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y) kita dapat melakukan uji hipotesis ini dengan cara membandingkan nilai signifikan (Sig.) dengan probabilitas 0,05 atau dengan cara lain yakni membandingkan nilai t hitung dengan t tabel.

1. Uji Hipotesis Dengan Membandingkan Nilai Sig Dengan 0.05

Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikan (Sig.) hasil output SPSS adalah:

- a. Jika nilai signifikan (Sig.) lebih kecil < dari probabilitas 0.05 mengandung arti bahwa jika ada pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y).
- b. Sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar > dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y).

Berdasarkan output pada tabel 1 diatas diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) yang diperoleh sebesar 0.002 lebih kecil dari < Probabilitas 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y)”

2. Uji Hipotesis Membandingkan Nilai T Hitung Dengan T Tabel

Pengujian hipotesis selanjutnya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel, uji ini sering disebut juga dengan uji t, dimana dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai t hitung lebih besar > dari tabel maka ada pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y)
- b. Sebaliknya, jika nilai t hitung lebih kecil < dari t tabel maka tidak ada pengaruh Belanja tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik regional Bruto (Y)

Berdasarkan output pada tabel 1 diatas diketahui nilai t hitung sebesar 4.355. karena nilai t hitung sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya kita akan mencari nilai t tabel. Adapun rumus dalam mencari t tabel adalah:

$$\text{Nilai } \alpha / 2 = 0.05 / 2 = 0.025$$

$$\text{Derajat kebebasan (df)} = n-2 = 10-2 = 8$$

Jadi nilai t tabel dapat dicari dengan melihat nilai 0.025 ; 8 kemudian kita lihat pada distribusi nilai t tabel, maka didapat nilai t tabel sebesar 2.306

Karna nilai t hitung yang diperoleh sebesar 4.355 yang lebih besar dari > t tabel 2.306, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y)”.

3. Melihat Besarnya Pengaruh Variabel X Terhadap Y

Untuk mengetahui besarnya pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y) dalam analisis regresi linear sederhana, kita dapat berpedoman pada nilai R Square atau R² yang terdapat pada output SPSS bagian Model Summary pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.839 ^a	.703	.666	820761.66026

a. Predictors: (Constant), X

Sumber : data diolah SPSS, 2020

Dari output SPSS pada tabel 3 diatas diketahui nilai R Square sebesar 0.703. nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik regional Bruto (Y) adalah sebesar 70.3 % sedangkan terdapat 29.7 % pengaruh terhadap produk domestik regional bruto yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji analisis yang dilakukan dengan merujuk pada pembahasan diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa “Belanja Tidak Langsung (X) berpengaruh positif terhadap Produk domestik regional Bruto (Y) dengan total pengaruh sebesar 70.3 %. Untuk tingkat signifikansi dengan probabilitas 0.05 didapatkan bahwa nilai signifikansi (Sig.) yang diperoleh sebesar 0.002 lebih kecil dari < Probabilitas 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y)”, sedangkan mencari nilai signifikan melalui uji t maka diperoleh nilai t hitung sebesar 4.355 yang lebih besar dari > t tabel 2.306, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y)”. hal ini disebabkan karna belanja tidak langsung didalamnya terdapat alokasi belanja untuk belanja pegawai yang secara langsung pendapatan pegawai tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Semakin meningkat pendapatan pegawai maka belanja kebutuhannya juga akan meningkat yang akan berdampak terhadap peningkatan produk domestik regional bruto.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji analisis yang dilakukan dengan merujuk pada pembahasan diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa “Belanja Tidak Langsung (X) berpengaruh positif terhadap Produk domestik regional Bruto (Y) dengan total pengaruh sebesar 70.3 %. Untuk tingkat signifikansi dengan probabilitas 0.05 didapatkan bahwa nilai signifikansi (Sig.) yang diperoleh sebesar 0.002 lebih kecil dari < Probabilitas 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y)”, sedangkan mencari nilai signifikan melalui uji t maka diperoleh nilai t hitung sebesar 4.355 yang lebih besar dari > t tabel 2.306, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y)”.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran – saran sebagai berikut:

1. Sekiranya pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan lagi belanja tidak langsungnya agar pegawai memiliki daya beli yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan lagi anggaran untuk belanja tidak langsung

masing SKPD.

3. Diharapkan bagi seluruh pegawai dalam memnuhi kebutuhannya lebih mengutamakan menggunakan barang yang ada di Kabupaten Mamuju.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju. 2020. Kabupaten Mamuju Dalam Angka 2020. BPS. Mamuju.
- Jhingan, M.L. 2010. Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- LP3M STIE Muhammadiyah Mamuju. 2015. Buku panduan Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi. STIE Muhammadiyah Mamuju. Mamuju
- Machmud, Amir. 2016. Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi. Erlangga. Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory., Quah, Euston., dan Wilson, Peter. 2012. Pengantar Ekonomi Makro: *Principles of Economics An Asian Edition (Volume 2)* (Alih Bahasa: Biro Bahasa Alkemis).Salemba Empat. Jakarta:
-2014. Pengantar Ekonomi Makro. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Salvtore, Domenick. 2017. Ekonomi Internasional. Salemba Empat. Jakarta Selatan.
- Sjafrizal. 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonom. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Subandi. 2016. Ekonomi pembangunan. Alfabeta. Bandung.
- Sukirno, Sadono 2012. Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS. Andi. Yogyakarta.
- Tarigan, Robinson. 2012. Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Todaro, M.P. dan Stephen C. Smith. 2011. Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.